

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Perilaku Politik

Menurut Surbakti (2009:130) Perilaku pemilih adalah “suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode”.

Budiharjo (2012:163) menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh perilaku pemilih, yaitu:

- a. Keyakinan agama yang diimani oleh individu. Sebagai contoh Islam mendorong pemeluknya untuk memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran, mengkritik dan mengawasi penguasa dan seterusnya. Ini merupakan dorongan internal dalam partisipasi politik.
- b. Jenis kultur politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tergantung kegiatan politik yang mempengaruhinya. Terkadang, kultur politik mendorong seseorang untuk berpartisipasi secara aktif, tetapi terkadang justru menjadikan seseorang buta politik,
- c. Karakter lingkungan politik. Dalam masyarakat yang menghormati supremasi hukum dan kebebasan politik, sistem politiknya bersifat multipartai, mengakui hak kritik dan partisipasi rakyat, dan banyak memberi kesempatan kepada anggota masyarakatnya untuk melakukan partisipasi dalam kehidupann bernegara. Demikian pula, keberadaan partai-partai

dengan segala ragamnya, juga berarti jaminan atas adanya oposisi yang institusional yang dengannya mereka melakukan partisipasi politik dan ikut mengambil keputusan. Artinya, ideologi dan sistem politik masyarakat memberikan pengaruh besar kepada partisipasi warganya.

d. Faktor Personal

- 1) Tingkat partisipasi warga dalam aktifitas politik tergantung, terutama, kepada tingkat perhatiannya. Maksudnya, tergantung kepada motivasi yang dimilikinya dalam berpartisipasi politik. Dorongan-dorongan positif yang mengantarkan seseorang kepada aktivitas politik dapat terwujud melalui: media-media komunikasi politik, seperti membaca koran dan diskusi-diskusi informal. Propaganda politik dan berbagai upaya untuk mengubah orientasi, terkadang mendorong masyarakat untuk ikut tenggelam dalam partisipasi tersebut
- 2) Perilaku pemilih juga tergantung kepada tingkat kemampuan dan kecakapan yang dimiliki individu. Misalnya untuk memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, kemampuannya untuk memilih dan berkesadaran politik yang kritis, juga berorientasi kepada pelayanan lingkungan dan minat untuk memecahkan problematikanya.
- 3) Keyakinan individu akan kemampuannya dalam mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah merupakan dorongan psikologi untuk berpartisipasi

Di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik itu pemilu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.kota perilaku politik itu

berupa perilaku pemilih dalam menentukan sikap dan pilihan mereka dalam melaksanakan pemilukada. Perilaku pemilih tersebut pasti didasari oleh bagaimana individu tersebut atau pemilih itu. Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar mendukung dan memilih kontestan politik yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini merupakan konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Keputusan untuk memilih yang terjadi selama pemilihan umum merupakan perilaku yang ekspansif ataupun perilaku yang terjadi hanya pada saat-saat tertentu saja. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa perilaku politik yang demikian rupanya hampir sama dengan perilaku dukungan supporter. Inilah yang menjadi permasalahan ketika banyaknya pemilih yang cenderung perilaku politiknya termanifestasi pada satu poin tertentu, bisa itu karena adanya suatu keterkaitan si pemilih dengan si calon atau kandidat.

Menurut Asfar (2004:137), bahwa perilaku pemilih dapat diketahui dengan tiga faktor yaitu:

1. Faktor Sosiologis

Faktor ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh-pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku politik seseorang. Karakteristik sosial seperti pekerjaan, pendidikan sampai karakteristik sosiologis seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya merupakan bagian-bagian dan faktor-faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Singkat kata pengelompokan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama dan

semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan seseorang. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang.

2. Faktor Psikologis

Faktor ini menggunakan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku politik. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku politik kalau ada proses sosialisasinya. Oleh karena itu menurut faktor ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku politik seseorang. Oleh karena itu pilihan seseorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik tidak jarang sama dengan pilihan politik orang tuanya. Faktor psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi kepada kandidat.

3. Faktor Rasional

Dalam konteks faktor rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih pemimpin yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi. Faktor ini juga mengandaikan bahwa calon pemimpin melakukan berbagai promosi dan kampanye yang bertujuan untuk menarik simpati dan keinginan masyarakat untuk memilih dirinya pada pemilu.

Asfar (2004:145), menyatakan bahwa perilaku pemilih bagi masyarakat desa akan memiliki keterkaitan dengan 4 (empat) faktor yaitu: kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan dan budaya politik. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Faktor kekuasaan meliputi cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat. Kekuasaan ini menurut Andraini merupakan dorongan manusia dalam berperilaku politik termasuk perilaku memilih yang tidak dapat diabaikan.
2. Faktor kepentingan merupakan tujuan yangdikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Dalam hal ini, Laswell menyatakan bahwa padadasarnya dalam mengejar kepentingan tersebut manusia membutuhkan nilai-nilai: kekuasaan, pendidikan, kekayaan, kesehatan, ketrampilan, kasih sayang, keadilan dan kejujuran.
3. Faktor kebijakan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk perundang-undangan, kebijakan akan memiliki implikasi penting dalam perilaku politik terutama yang dilakukan oleh elit masyarakat.
4. Budaya politik yaitu orientasi subyektif individu terhadap sistem politik. Kebudayaan politik sebagai orientasi nilai dan keyakinan politik yang melekat dalam diri individu dapat dianalisis dalam beberapaorientasi yaitu orientasi kognitif, afektif dan orientasi evaluasi yang mendasari perilaku politik.

Keempat faktor tersebut, menunjukkan banyak orang melakukan manuver politik untuk berlindung kepada orang yang memiliki kekuasaan karena mereka kurang percaya diri dalam kemampuan mereka sendiri, inilah yang dimaksud dengan ketidakamanan emosional. Beberapa orang kadangkala berperilaku politik untuk memanipulasi orang lain demi kepentingan mereka. Dalam kajian mengenai kepribadian, tipe ini disebut sebagai machievellian. Kata ini digunakan untuk menggambarkan karakter yang sesuai dengan prinsip Machiavelli dalam teori politiknya. Banyak eksekutif yang selalu berusaha menggunakan kriteria rasional dalam mengambil keputusan, namun keputusan ini seringkali terhambat oleh ketidaksepakatan dari anggota organisasi. Apabila strategi dan tujuan telah dipahami dengan mendalam oleh anggota organisasi kunci, perilaku politik tidak dapat dihindari dalam pengambilan keputusan organisasi.

2.2 Konsep Budaya Politik

Ummati (2002:32) mengartikan Budaya politik adalah “pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya”. Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Secara sederhana, Pengertian Budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipratkan suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik.

Banyak sarjana ilmu politik yang mengkaji mengenai budaya politik sehingga terdapat beragam konsep budaya politik. Namun dari konsep tersebut memiliki derajat perbedaan yang tidak begitu besar, sehingga dapat tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambut yang sama. Hal ini tersebut terjadi pada pengertian budaya politik yang dimana banyak para ahli ilmu politik yang mendefinisikan budaya politik antara lain sebagai berikut...

1. Menurut Austin Ranney (dalam Andrain, 2002:192) pengertian budaya politik adalah “seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik”.
2. Gabriel A. Almond (dalam Gatara, 2009:217), pengertian budaya politik adalah “sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi”.
3. Sidney Verba (dalam Sastroatmojo, 2005:56) budaya politik adalah “suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan”.
4. Moctar Massoed: Menurut Moctar Massoed, pengertian budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.
5. Miriam Budiardjo: Menurut Mirriam Budiardji, budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.

Ciri-Ciri Budaya Politik menurut Budiharjo (2012:276), terdiri dari:

- a. Terdapat pengaturan kekuasaan
- b. Perilaku dari aparat-aparat negara
- c. Proses pembuatan kebijakan pemerintah
- d. Adanya kegiatan partai-partai politik
- e. Adanya gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah
- f. Mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat
- g. Adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi.

Menurut Gabriel. (2004:120), budaya politik terbagi dalam tiga jenis antara lain sebagai berikut

1. Budaya politik apatis (masa bodoh, pasif, dan acuh)
2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja di mobilisasi)
3. Budaya politik partisipasif (aktif).

Ketiga jenis budaya politik adalah sebagai kondisi-kondisi yang dapat mewarnai corak kehidupan dalam bermasyarakat, dan merupakan bagian dari kehidupan berpolitik, di mana dari budaya politik itu menjadi sebuah fenomena dalam masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap struktur dan sistem dalam dunia perpolitikan itu sendiri. Rusadi Sumintapura menyatakan bahwa budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu itu sendiri dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota suatu sistem politik itu sendiri.

Budaya politik dibagi dalam beberapa tipe berdasarkan dari orientasi politiknya. Aribowo (2007:56) menyatakan macam-macam budaya politik atau tipe-tipe budaya politik adalah sebagai berikut:

1. Budaya Politik Parokial adalah budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya politik parokial umumnya terdapat dalam masyarakat tradisional dan lebih bersifat sederhana. Budaya politik parokial adalah orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya pemerintahan dan politik. Ciri-cirinya meliputi:
 - a. Apatis
 - b. Lingkupnya sempit dan kecil
 - c. Pengetahuan politik rendah
 - d. Masyarakatnya yang sederhana dan tradisional
 - e. Adanya ke tidak peduli dan juga menarik diri dari kehidupan politik
 - f. Anggota masyarakat condong tidak berminat terhadap objek politik
 - g. Tidak ada peranan politik bersifat khusus
2. Budaya politik kaula adalah budaya politik dengan masyarakat yang sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya, namun masih relatif pasif. Budaya politik kaula atau subjek berada pada orang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, akan tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun

memberikan suara dalam pemilihan. Budaya politik kaula memiliki tingkat perhatian pada sistem politik sangat rendah. Ciri-cirinya meliputi:

- a. Masyarakatnya sudah menyadari adanya otoritas pemerintah dan mengetahui kewenangan yang dimilikinya.
 - b. Masyarakatnya bersifat pasif, artinya tidak dapat memberi masukan dan saran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun mereka mau mematuhi aturan dan norma yang ada.
 - c. Masyarakatnya menerima semua keputusan pemerintah yang berkuasa merupakan sebuah aturan yang tidak bisa dirubah apalagi ditentang. Hal ini banyak terjadi pada negara dengan bentuk kerajaan
 - d. Warga negara masih belum mau ikut serta dan berbuat sesuatu untuk membantu penyelenggaraan negara dan politik yang ada di lingkungan terkecilnya maupun di lingkup negara sendiri.
 - e. Warga negara hanya berminat dengan hasil atau output dari penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Sama sekali tidak mau tentang bagaimana inputnya, agar politik bisa berjalan lebih baik.
3. Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang sangat berbeda dengan dua budaya politik yang telah kita bahas sebelumnya. Pada budaya politik partisipan masyarakatnya merupakan masyarakat yang

terbuka, yang sudah bisa menerima segala sesuatu dari luar dan menerapkannya dalam kehidupan apabila sesuai dengan norma-norma mereka. Akibatnya, masyarakat yang seperti ini bisa dengan mudah diarahkan untuk mempunyai kecondongan terhadap politik tertentu, penyelenggaraan pemerintahan, dan semua aspek negara di dalamnya. Pada umumnya masyarakatnya sudah sadar, mereka harus berpartisipasi aktif dalam politik, meskipun dengan peran yang sangat kecil, karena hal tersebut akan menentukan kehidupan mereka. Ciri-ciri budaya politik partisipan, antara lain:

- a. Masyarakat sudah lebih terbuka, dan dapat dengan cepat menerima informasi apa saja dengan teknologi yang sudah lebih maju.
- b. Masyarakat dan warga negara sudah lebih menyadari hak dan kewajibannya dan dapat bertanggungjawab dengan kewajiban yang dimilikinya.
- c. Masyarakatnya sudah lebih disiplin, sehingga mereka dapat menilai semua objek politik, pemerintahan, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.
- d. Warga negara sudah menyadari akan perlunya partisipasi aktif dalam politik. Karena partisipasi aktif akan ikut menentukan nasib mereka sendiri di masa yang akan datang.

Pemahaman berbagai macam budaya politik merupakan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu, karena budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat

yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Budaya politik merupakan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adatistiadat, tahayyul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

Hakekat kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan politik, maka jika ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu bangsa secara bulat dan utuh, maka kita pun dituntut untuk melakukan penelahan terhadap sisinya yang lain. Berkaitan dengan sistem politik, kebudayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem, disamping itu kebudayaan politik lebih mengutamakan dimensi psikologi suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan atau simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam masyarakat sekaligus harapan-harapannya.

Sistem kepercayaan dan nilai-nilai merupakan bagian dari budaya politik yang biasanya menyangkut masalah nilai dan pandangan politik yang hampir selalu berkaitan dengan peraturan dan pertarungan kekuasaan. Karena budaya politik adalah aspek-aspek politik dari system-sistem nilai yang terdiri dari: ide-ide, pengetahuan, adat-istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut member rasional untuk menolak atau menerima nilainilai dan norma lain. Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik (*political culture*)

yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah budaya dari keseluruhan dari pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap, politik dan pandangan hidup pada umumnya.

Budaya politik mengutamakan dari psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi diseluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan politik misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangan mengenai situasi politiknya.

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang relevan yang telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Saputra (2016) Judul Perilaku Budaya Politik masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Desa Nanga Mahap Kabupaten Sekadau. Secara umum permasalahan yang di angkat dalam tesis ini adalah untuk menganalisis pemilih pemula tidak menggunakan hak suaranya pada pemilu legislative tahun 2014. Dari KPU Kabupaten Sekadau menunjukkan 63% pemilih pemula yang tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah mengenai perilaku pemilih pemula di Desa Nanga Mahap Kabupaten Sekadau yang golput dalam pemilihan umum dikarenakan mereka masih melihat dalam pemilu yang sebelumnya para caleg cenderung terlalu menggumbar janji, namun setelah terpilih tidak dibuktikan. Selain itu keputusan politik mereka

masih belum bulat menyebabkan pilihan politik mereka mudah mendapat pengaruh dari lingkungan dan pertemanan yang terbentuk di tempat tinggal mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan observasi dan pedoman wawancara *purposive sample* sebagai teknik dan alat pengumpulan data.

2. Gunawan (2015) Judul: Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Langsung Kota Malang. Penelitian ini secara umum mengangkat permasalahan dinamis yang menjadi bagian paling dominan dalam pelaksanaan Pilkada, di mana permasalahan sebenarnya masih berkuat pada penilaian adanya bentuk pelanggaran, *money politic*, konflik antar pendukung calon dan persoalan lain yang masih berhubungan dengan perilaku politik pemilih pemula yang belum rasional. Bahkan rentetan permasalahan tidak jarang berujung pada penolakan hasil pilkada. Perilaku pemilih pemula nampak masih terlihat diwarnai kesederhanaan dalam pengetahuan politiknya, dari sinilah menarik untuk mengetahui atau diteliti dengan rumusan masalah “Bagaimana perilaku pemilih pemula dalam pelaksanaan pilkada langsung Kota Malang.

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula dalam aktivitas politik serta dalam mengambil keputusan politiknya masih didasarkan pada kurang rasionalnya pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya, persoalan umum yang terjadi pada pemilih pemula ini, di latar belakang oleh minimnya pengetahuan politik yang dimiliki oleh pemilih pemula, pemilih pemula juga kurang mendapat bimbingan dari orang tua mengenai

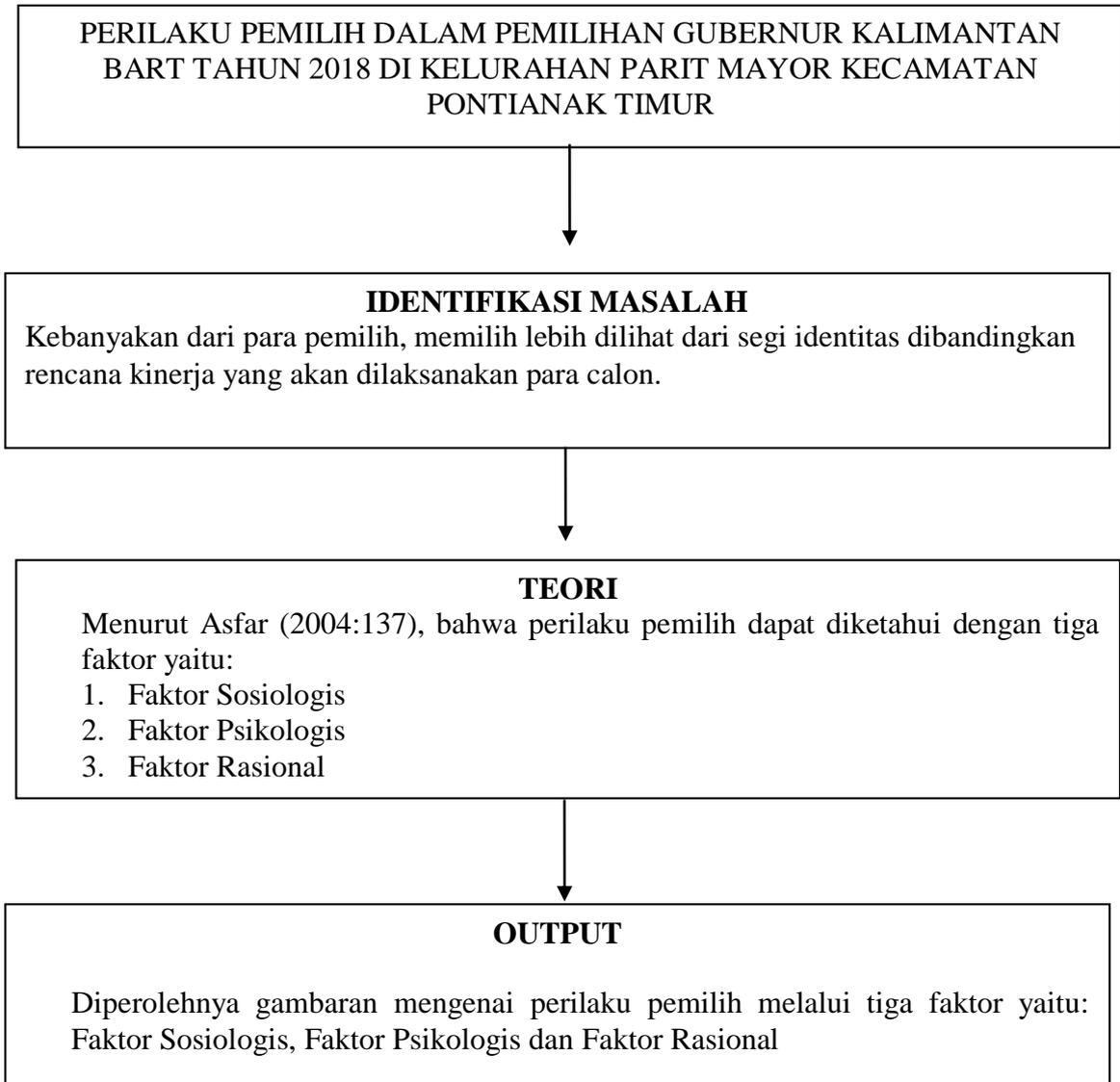
system pilkada, sehingga pada akhirnya pemilih pemula tersebut lebih banyak memperoleh informasi dari luar seperti, baliho, pamphlet, dan media masa, akibat dari perilaku budaya politik yang demikian, menyebabkan terjadinya perubahan, sehingga dapat disimpulkan dalam setiap pelaksanaan Pilkada pemilih pemula lebih mementingkan urusan mereka sendiri daripada menggunakan hak mereka sebagai pemilih pemula.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir ialah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori/konsep yang ada tentang variabel yang diteliti dan merumuskan dari masalah yaitu: mengenai “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Pada Tahun 2018 Di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur”.

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitiannya, diantaranya. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perilaku pemilih, dan teori yang dipakai adalah Teori menurut Asfar (2004:137), bahwa perilaku pemilih dapat diketahui dengan tiga faktor yaitu: Faktor Sosiologis, Faktor Psikologis dan Faktor Rasional. Teori Asfar tersebut dengan tujuan untuk melihat kecenderungan perilaku pemilih melalui beberapa faktor.

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran sebagaimana diungkapkan di atas, maka alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1**Alur Pikir Penelitian**

2.6 Asumsi/Pertanyaan Penelitian

Asumsi merupakan anggapan yang berdasarkan dalam suatu penelitian yang diyakini kebenarannya oleh peneliti. Asumsi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku pemilih dilihat dari faktor sosiologi Dalam Pemilihan Gubernur Pada Tahun 2018 di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur
2. Bagaimana perilaku pemilih dilihat dari faktor psikologi Dalam Pemilihan Gubernur Pada Tahun 2018 di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur
3. Bagaimana perilaku pemilih dilihat dari faktor rasional Dalam Pemilihan Gubernur Pada Tahun 2018 di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur.